



IPB University
— Bogor Indonesia —

Judul: Data B.P.S. Untuk Menjabarkan Indikator Perkembangan “Pertumbuhan, Pemerataan Dan Partisipasi”.

Penulis: Sajogyo

Saran Pengutipan: Sajogyo. (1983). “Data B.P.S Untuk Menjabarkan Indikator Perkembangan “Pertumbuhan, Pemerataan Dan Partisipasi””. Makalah. Pusat Studi Pembangunan-IPB.

Sumber: Perpustakaan Sajogyo Institute

Digitalisasi dan penyebarluasan karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

DATA B.P.S. UNTUK MENJABARKAN INDIKATOR PERKEMBANGAN
"PERTUMBUHAN, PEMERATAAN DAN PARTISIPASI"

Oleh

SAJOGYO

(Pusat Studi Pembangunan - IPB)

1. Sampai mana data yang tersedia di B.P.S. (Biro Pusat Statistik) dapat dipakai menjabarkan indikator perkembangan "pertumbuhan, pemerataan dan partisipasi" menurut pola anjuran F.A.O./U.N. ? (lihat Bagan di Lampiran 1).

Dua pola yang sudah diterbitkan B.P.S. yaitu:

(a) Indikator Ekonomi (bulanan) dan (b) Indikator Kesejahteraan Rakyat (tahunan) yang jika disatukan dapat dibandingkan, sampai mana B.P.S. sudah mendekati pola F.A.O. tersebut. Jelas, unsur InKesRa-lah yang relatif masih perlu dibenahi paling banyak jika pola F.A.O. tersebut dipakai sebagai patokan.

Jika kita memakai patokan nasional, terutama "delapan jalur pemerataan" (dimulai dari jalur "peluang berusaha" dan "peluang bekerja" sampai mencakup "peluang sama di depan hukum"), pada pola InKesRa kita-pun tampak ke-tidak-lengkapannya. InKesRa dengan 11 bab jika dipadatkan menjadi 6 gugus saja, mencakup (1) penduduk, migrasi, angkatan kerja, KB; (2) pendidikan dan sosial-budaya; (3) kesehatan dan gizi; (4) konsumsi dan pengeluaran rumah tangga; (5) lingkungan hidup dan pemerataan dan (6) keamanan dan ketertiban masyarakat.

Membanding pola "delapan jalur pemerataan" itu dengan pola anjuran F.A.O., kita masih perlu menambah satu (atau lebih?) jalur yaitu yang menjawab pertanyaan "apa yang menentukan peluang berusaha dan bekerja"?. Dalam pola F.A.O. unsur itu tercantum, termasuk salah satu dari 8 gugus "pemerataan", yaitu "penguasaan sumberdaya lahan, air, faktor produksi dan luas cakupan pelayanan sarana produksi". Di sini pantas kami kutip dari isi "Peasants' Charter", yaitu Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Program Kegiatan, hasil Konferensi Sedunia "Agrarian Reform and Rural Development" (WCARRD), tahun 1979 yang telah disepakati oleh R.I. kita,

(pada bagian "target") "..... the reduction of rural poverty as measured by indicators of distribution of land and other assets, levels of income (including rural-urban differentials and distribution of rural income) and extent of absolute poverty in terms of satisfaction of basic requirement, especially in nutrition".

2. Berdasar luas pemilikan lahan dan penggolongan ISIC, Downey (draft, 1981) pernah mengajukan satu usulan klasifikasi golongan status sosial-ekonomi (SSE) (Lampiran 2). Sampai mana klasifikasi itu "baik/sesuai" hanya dapat ditentukan jika telah dapat diuji. Keuning (1981) pernah melakukan pengujian itu, khususnya menelaah akibat hubungan sewa/sakap antara golongan petani pemilik lahan "relatif luas" dan golongan petani "lahan sempit". Hasilnya -- distribusi pendapatan yang lebih timpang -- searah dengan sejumlah studi intensif (kasus) di Jawa (antara lain oleh Studi Dinamika Pedesaan). Sebagian hasil itu sudah menjawab permintaan perhatian oleh Presiden (Pidato Agustus tahun 1982) atas gejala "makin besar jumlah petani gurem dan petani tunakisma".

Dari kemampuan menjawab pertanyaan "apa sebab, apa akibat"? memang orang belum tentu cepat menemukan "cara mengatasinya" tapi dari langkah pertama itulah orang mulai !

Di dalam mengukur "tingkat kemiskinan" dengan beragam cara Downey praktis memakai penggolongan SSE itu sebagai "variabel pengaruh" yang banyak menentukan ! Dari beragam perbandingan itu tampak (dari data se-Indonesia) bahwa pemilikan lahan lebih atau kurang dari 0.5 hektar merupakan "satu batasan": atas dasar ini klasifikasi "petani kecil" (lebih dari 0.5 ha, di Indonesia rata-rata 1.2 ha) dan "petani gurem" (kurang dari 0.5 ha, rata-rata hanya 0.25 ha) sangat relevan. Kesimpulan ini bukan saja dari memperhatikan arti usahatani bagi rumah tangga tiap golongan itu, tapi juga dari memperhatikan arti usaha "bukan-pertanian", kaitan antara kedua sisi itu dan hasil totalnya dari musim ke musim dan total setahun. Dalam hal ini baik "definisi" maupun satuan analisa (pencacahan) erat berkaitan. Jadi, misalnya sampai mana "tingkat hidup buruhtani itu lebih baik dari

petani gurem", ditentukan oleh pilihan definisi dan satuan analisa, dan kaitan antara keduanya, sesuai dengan maksud-tujuan analisa kita, dalam hal ini memberi arti pada "tingkat hidup", (Wiradi, 1983). Dalam hal ini diharap suatu interaksi antara pendekatan studi kasus intensif (satu-satu desa) dan studi survey-meluas, tugas BPS yang manfaat hasilnya dapat dinilai oleh pihak pemakai: pembuat kebijakan dan pelaksana !

Dengan tak terduga, Sensus Penduduk 1980 sendiri memberi contoh kericuhan pengertian "petani" dan "buruhtani" yang berbeda definisi pada "sensus total" dan pada "sampel 5%". Dalam hal pertama, jika tak menyimak isi "daftar pertanyaan", orang tak akan memahami adanya sumber kericuhan (yaitu satuan analisa) karena daftar "definisi" lengkap. Dan memang sudah terjadi, ada muncul tabel (di satu lokakarya nasional) yang menunjukkan jumlah rumahtangga yang terlibat "pertanian" (petani dan buruhtani) jadi melebihi jumlah total rumahtangga di Indonesia tahun 1980 !

Data dari sumber "sensus total" tahun 1980 sebenarnya tak sesuai untuk dibanding dengan data Sensus Pertanian, 1973 ! Sebaliknya, data pekerjaan "pertanian" (petani atau buruhtani) dari sampel 5% Sensus Penduduk, 1980 se-metode dengan Sakernas, lebih tepat sebagai sumber pembanding. (Sayang, justru tak masuk dalam rencana penerbitan BPS).

3. Data "tingkat pendapatan" (jalur ketiga dari 3 jalur kita) umumnya sulit diperoleh secara langsung, maka sebagai penggantinya adalah "tingkat pengeluaran rumahtangga" (per kapita sebulan, misalnya) yang dihasilkan secara berkala oleh seri SUSENAS. Satu indikator lain adalah "tingkat upah" yang masih lebih terperinci disajikan B.P.S. untuk upah buruh perkebunan dari pada upah dalam usahatani di desa. Jika pengeluaran rumahtangga (Susenas) juga terperinci apa saja barang dan jasa yang terjangkau per orang dalam masa tertentu, tingkat upah masih perlu dikaitkan dengan tingkat harga satu paket "kebutuhan pokok", tapi tanpa data mengenai berapa orang menjadi tanggungan si-pencari nafkah. Peluang bekerja sejak seri Sakernas, menemukan indikator tersendiri yaitu "jumlah jam kerja seminggu" pen-

cari nafkah tapi sering tanpa BPS menghubungkannya dengan "pendapatan" yang diperoleh selama bekerja itu. (Sebaliknya, studi kasus intensif sering sampai membanding "tingkat imbalan kerja": Rp/jam kerja).

Jika dalam hal data "pendapatan rumahtangga" umum terjadi "under-reporting" pada lapisan atas, dalam hal data "pengeluaran rumahtangga", khususnya data "tingkat makanan" lapisan bawah yang diduga terkena gejala "under reporting". Hanya setelah melakukan "suatu koreksi" pada data lapisan bawah ini (atas dasar asumsi tertentu), orang dapat mengenalkan suatu (atau beberapa) "garis kemiskinan". Atas data Susenas, 1976 setelah melakukan "koreksi" pada konsumsi kalori lapisan bawah, Hutabarat (1979) menemukan satu persamaan regresi (semilog), hubungan kuat antara tingkat pengeluaran (Rp/orang/bulan) dan tingkat kalori (rata-rata kal./or./hari). Menurut regresi tersebut data Susenas, 1976 menunjukkan bahwa garis kemiskinan "setara 210 kg beras/orang/tahun" di desa (dan "360 kg/orang/tahun" di kota) dekat sekali dengan "garis nyaris cukup kalori", anjuran 1900 kalori/orang/hari rata-rata. (Perhatikan: "setara kg-beras" dalam arti "nilai jual" beras, bukan "nilai kalori" !). Atas dasar itu lebih tepat menjadikan garis tersebut sebagai garis kemiskinan paling bawah !

Koreksi data konsumsi rumahtangga Susenas, 1976 telah dilakukan Downey dengan cara lain, yaitu mengintegrasikannya dengan pembentukan Tabel Input-Output, 1975. Penyesuaian itu dilakukan dalam hal kategori konsumsi, mengingat perbedaan populasi (dan subsample) dan berupa perapian agregat tiap golongan. Dari membanding antar-golongan SSE diperoleh gambaran golongan SSE mana yang paling banyak terkena kurang kalori, memakai patokan "anjuran". Sebenarnya, Downey telah menunjuk pada beragam "garis kemiskinan", masing-masing menurut distribusi suatu kebutuhan pokok: kecuali pangan (kalori, protein) juga sarana perumahan dan isi/alat rumah. Juga jumlah anggota rumahtangga ditemukan sebagai "ciri" tingkat hidup: makin miskin makin kecil rumahtangga! (Hal ini juga ditemukan oleh peneliti kasus desa, studi intensif).

Dalam hal menguji ketepatan data konsumsi makanan (dari pengeluaran rumahtangga, Susenas), sebenarnya anjuran kami empat tahun lalu dalam suatu Lokakarya BPS (Sajogyo, 1979) masih berlaku. Perlu metode recall "makanan rumahtangga selama seminggu lalu" pada Susenas dibandingkan dengan metode lain yang sudah dikenal tingkat ketepatannya, misalnya yang dikembangkan oleh Puslitbang Gizi, Departemen Kesehatan (recall sehari yang lalu, dengan pengecekan dari penimbangan bahan serupa). Kontrol pada satu subsample kecil Susenas (lebih baik di-ulang di tiap jenis "pola makanan pokok karbohidrat") mungkin juga dapat menemukan pada lapisan miskin jenis-jenis makanan yang nilainya masih kurang dikenal.

Membanding dengan suatu "indeks" (harga beras per kg pada suatu waktu atau harga satu paket barang/jasa) memerlukan kecermatan, agar tingkat hidup rumahtangga pada suatu lapisan diukur dengan indeks yang berlaku pada lapisan tersebut, bukan dibanding dengan "indeks rata-rata". Akhirnya, besar rumahtangga (jumlah orang yang mengkonsumsi) perlu dinyatakan dengan jumlah "satuan konsumsi", mengingat susunan (umur, sex) anggota rumahtangga. Pertanyaan "jumlah orang yang mengkonsumsi" bahkan lebih tepat, karena mungkin mencakup orang lain yang mendapat suguhan, misalnya karena upacara selamat atau membantu suatu pekerjaan dalam rumahtangga.

Dan mengenai ukuran "jumlah jam kerja seminggu" sebagai indikator "peluang bekerja"? Disinipun perlu membanding dengan metode yang berlainan "rujukan waktu", misalnya "seminggu lalu" dalam Sakernas (dan dalam sample 5% Sensus Penduduk 1980) dibanding dengan recall atas "tiap hari selama 7 hari yang lalu". Pernah studi Peranan Wanita di Pedesaan, menemukan bahwa hasil recall "sebulan lalu" menghasilkan data "jumlah jam kerja setahun" antara 29% dan 38% lebih kecil dibanding hasil recall "sehari lalu". Itu pada laki-laki dewasa; pada wanita dewasa bahkan perbedaan itu lebih menyolok antara 23% dan 45% ! (Winati, dkk. 1980; White, 1983).

Data tingkat pendapatan/pengeluaran rumahtangga, tingkat upah maupun jam kerja/minggu, khususnya untuk masyarakat desa, perlu dibanding antar musim. Jika hanya dapat mengukur dalam waktu terbatas (bahkan hanya sempat sekali saja),

paling tepat memilih waktu musim "titik rendah" (serba kekurangan) untuk mengetahui siapa (golongan SSE) dan berapa orang yang tergolong "sekeng" (istilah "ekonomi lemah" di Banyumas, Jawa Tengah), yaitu mereka yang belum bebas dari paceklik.

Kita masih saja menunggu kapan dari pihak policymaker ada keputusan apakah secara resmi menetapkan satu (beberapa) garis kemiskinan (baru dari Departemen Sosial yang ada patokan?) dan apa ukuran peluang bekerja yang dinilai "cukup" untuk target suatu Repelita. Tiap ukuran itu memang perlu ditinjau kembali setiap lima tahun.

Dengan patokan-patokan itu lebih mudah menetapkan golongan-golongan sasaran beragam kebijakan dan program serta mengukur kemajuan pembangunan sampai mana mengenai sasaran yang diprioritaskan itu.

4. Dari gugus "gizi" (pola indikator FAO) ada satu indikator yaitu "anak balita gizikurang" yang mulai digarap oleh BPS, bukan dalam InKesRa, melainkan dalam "Profil Statistik Anak dan Ibu di Indonesia, 1982" di Bab "kesehatan", walau baru berupa data "hasil penimbangan anak" (rumus SKDN, Departemen Kesehatan/BKKBN). Diduga lebih separoh ukuran tingkat gizi buruk pada anak tercermin pada angka kematian golongan rawan tersebut.

Khususnya angka kematian bayi diduga adalah indikator peka akan keadaan lingkungan rumahtangga pengasuhnya, keadaan kesehatan si-ibu dan penyediaan air bersih di lingkungan tersebut. Satu indikator lain, yaitu "harapan hidup pada umur 1 tahun" menunjuk pada keadaan pangan/gizi (terutama umur 1-4 tahun) dan lingkungan sosial di luar rumahtangga.

Dua indikator tersebut dikombinasikan dengan yang ketiga, yaitu "tingkat melek huruf orang dewasa (15 tahun lebih)" oleh Overseas Development Council (Washington DC) dipadukan menjadi "Physical Quality of Life Index" (PQLI).

Mengingat bahwa ciri melek huruf merupakan sumberdaya mental (berarti kemampuan lebih untuk berpartisipasi dalam pembangunan), terjemahan kita atas PQLI cukup dengan sebutan Indeks Mutu Hidup (tanpa kata "fisik"). Untuk menghindari bahwa tiga indikator itu secara terpisah akan dianggap urusan "kesehatan" dan "pendidikan" semata-mata, dicoba (lihat

bagian di Lampiran 3) untuk menempatkannya dalam kerangka "delapan jalur pemerataan" kita, agar jelas bahwa hasil akhir yang dicatat oleh IMH itu adalah tanggung-jawab semua pihak, baik masyarakat luas (mencakup pemerintah) maupun masyarakat lingkungan kecil serta satuan-satuan rumah tangga dengan kemampuan dan kemauan (keinginan) masing-masing. Berbeda dari "laporan pembangunan" yang lazimnya berisi perincian "serba input", IMH merupakan alat pengukur "output" keseluruhan pembangunan : "the total effect of social and economic policy as well as how private income is spent" (Morris, 1982).

Berdasar data hasil dua kali Sensus Penduduk, baru-baru ini diperoleh hasil membanding IMH tahun 1971 dan tahun 1980, antar Propinsi (kecuali DKI Jakarta, Irian Jaya dan Timor-Timur), antar urban dan rural dan antar laki-laki dan perempuan (Sajogyo, dkk. 1983).

Dari hasil telaahan itu jelas bahwa:

- (a) dengan IMH rata-rata yang meningkat dari 45 ke 57 dalam masa 9 tahun (1971-1980), rata-rata IMH Indonesia tahun 1980 itu sudah dicapai pada tahun 1960 oleh Thailand (IMH 60) maupun Filipina (58),
- (b) kesenjangan hasil pembangunan, menurut ukuran IMH, masih tetap besar antara masyarakat desa dan kota di Indonesia. IMH rural meningkat dari 41 ke 53 dan IMH kota dari 59 ke 69, yang berarti pengurangan kesenjangan desa-kota baru sekecil 2 satuan (tahun 1971 : 18, kemudian 16),
- (c) kesenjangan IMH laki-laki dan perempuan ternyata kecil saja: tahun 1971 di desa sekecil 3 (yaitu 43-40), tahun 1980 mengecil jadi 2 (yaitu 55-53) dibanding kota dengan selisih lebih kecil lagi (tahun 1971: 60-58 dan tahun 1980: 69-68). Hal ini berarti bahwa usaha perbaikan status dan posisi perempuan hanya punya arti sebagai bagian usaha perbaikan masyarakat lingkungannya, bersama-sama laki-laki, di mana masyarakat desa-lah yang tertinggal !
- (d) perbandingan antar propinsi menunjukkan kecil korelasi ($RHO = 0.46$, pada 5%) antara IMH dan PRP (Pendapatan

Regional Propinsi, per orang setahun, tanpa hasil minyak bumi/tambang). Laju perbaikan IMH (disebut LKS = Laju Pengurangan Kesenjangan, dari DRR = Disparaty Reduction Rate; Grant, 1978) pada taraf "lebih dari rata-rata Indonesia" terjadi (selama 1971-1980) pada 11 propinsi yang mencakup 63% penduduk. Dan dari jumlah penduduk yang mengalami perbaikan mutu hidup "dengan kelajuan lebih" itu, 79% adalah penduduk di 7 propinsi dengan pendapatan rendah (PRP/orang/tahun) maupun laju peningkatan PRP rendah (artinya: kurang dari rata-rata Indonesia, selama 1971-1980). Hal itu berarti bahwa unsur "tingkat pendapatan" (daerah) bukanlah segala-galanya dalam usaha perbaikan mutu hidup masyarakat (Contoh di Asia adalah kasus Sri Langka atau negara-bagian Kerala di India). (Diduga akan lain soalnya jika variabel "pendapatan rumahtangga" yang kita bawakan, dihubungkan dengan IMH anggota rumahtangga !).

Bagaimana prospek masyarakat desa kita mencapai IMH setinggi 77 pada tahun 2000? (ini anjuran Kelompok Tinbergen, RIO Report, untuk "negara-negara berkembang"). Berdasar prestasi pembangunan selama 1971-1980 (ukuran LKS) di pedesaan, hanya di 7 Propinsi IMH setinggi 77 itu akan tercapai bagi masyarakat desa: ini menyangkut 33% penduduk desa tahun 1980. Dibanding dengan itu hampir dapat dipastikan bahwa 100% penduduk kota dapat mencapai taraf melebihi IMH 77. Tujuh propinsi yang telah mampu meletakkan "dasar-dasar pembangunan lebih kokoh" karena cukup baik membina pembangunan masyarakat desa selama 1971-1980 adalah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Utara.

Di dalam usaha mencapai IMH 77 itu (pada tahun 2000) bagi masyarakat desa, dimanakah hal itu terjadi dengan mencapai harapan hidup 64 tahun (waktu lahir)? Prestasi selama 1971-1980 memberi petunjuk (berdasar LKS harapan hidup 1 tahun) bahwa di 6 propinsi sasaran itu tahun 2000 dapat tercapai: Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Selatan, total mencakup 30% penduduk pedesaan tahun 1980.

Jika memakai ukuran laju penurunan Angka Kematian Bayi (mencapai 50 atau kurang per 1000) pada tahun 2000, lebih sedikit lagi propinsi yang menonjol karena prestasi di masa 1971-1980: hanya Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta dan Bali atau hanya mencakup 11% penduduk desa (th.1980). Hal ini agaknya sesuai dengan pengalaman di negara industri di masa lalu: angka kematian bayi baru menurun dalam tahap kemudian.

Jika dua indikator, Harapan Hidup (meningkat) dan Angka Kematian Bayi (menurun) sama-sama kita pertingkatkan, khususnya memperhatikan perbaikan mutu hidup dalam masyarakat pedesaan, hanya 4 propinsi yang patut mendapat penghargaan setinggi-tingginya, yaitu Aceh, Lampung, Yogyakarta dan Bali. Jika satu saja dari dua indikator itu yang dipakai ukuran, daftar kedua (untuk penghargaan) mencakup Propinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

5. Jika pola indikator (anjuran) FAO yang mencakup aspek-pertumbuhan, pemerataan dan partisipasi, kita telaah, kita temukan di dalamnya garis besar "8 jalur pemerataan" kita, ditambah unsur "plus" berupa indikator "pemerataan" dalam peluang menguasai sumberdaya produksi: lahan, air dan sarana lain. Untuk itu sebagian besar data yang diperlukan tersedia di Biro Pusat Statistik.

Kemudian, Indeks Mutu Hidup yang mencakup tiga indikator yang datanya juga tersedia dari sumber Sensus Penduduk, terbukti dapat memberikan alat penilai maupun perencanaan kedepan yang jika ditempatkan dalam kerangka "8 jalur pemerataan" kita dapat merupakan alat pemersatu di antara pembuat kebijakan di banyak sektor pembangunan. Hasil akhir (total) segala usaha pembangunan kita itu hanya tercapai dengan lebih lancar bilamana kerjasama dalam tiap sektor dan antar-sektor, antara aparat Pemerintah dan Lembaga Pembina Swasta, antara kelompok pembina tersebut dengan beragam kelompok masyarakat dan satuan desa (yang didukung langsung oleh kegiatan satuan-satuan rumah tangga di dalamnya) tak menemui kendala "sambungan" (mata rantai) lemah. Kekuatan satu untaian mata-rantai ditentukan oleh mata-rantai paling lemah. Jika satu paket in-

dikator sosial-ekonomi-budaya dapat membuat kita bersama lebih peka akan sesuatu kekurangan di fihak ikhtiar bersama kita yang disebut "pembangunan semesta", maksud kita menyiapkan seri indikator itu tercapai.

Kepustakaan:

- B.P.S.: Indikator Ekonomi (Buletin Statistik Bulanan), Jakarta, Februari 1983.
- B.P.S.: Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 1983.
- B.P.S.: Profil Statistik Anak dan Ibu di Indonesia, 1982, Jakarta, 1982.
- B.P.S.: Tingkat Perkembangan Kesejahteraan Rakyat 1970-1980, Jakarta 1982.
- B.P.S.: Ulasan Singkat, dalam "Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Hasil Pencacahan Lengkap S.P. 1980": Seri L No.3, hal. 5-10, Jakarta, 1981.
- F.A.O.: The Peasants' Charter: The Declaration of Principles and Programme of Action of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development, 1979, Rome, 1981.
- F.A.O.: Explanatory Notes on some Recommended Indicators for National Monitoring Purposes and Reporting to FAO on Agrarian Reform and Rural Development (Draft, 1982).
- Downey, R. : Indonesian Inequality and Poverty (Draft, Jakarta, 1980).
- Keuning, S.J.: Distributive Aspects of Indonesian Agriculture, with Respect to Smallholders Land Farm Food Crops (Draft, Jakarta 1981).
- Presiden R.I.: Pidato Kenegaraan, 16 Agustus 1982, Jakarta, 1982.
- Wiradi G.: Nasib Buruhtani: benarkah lebih baik daripada petani gurem? (SK KOMPAS, 21 Oktober 1983).
- Hutabarat, P.M.: Proyeksi Distribusi Konsumsi Kalori Menurut Kelompok-Kelompok Pendapatan di Indonesia tahun 1990 (Thesis MS, Fak. Pasca Sarjana, IPB, 1979).
- Sajogyo: Pemanfaatan data Susenas dan Sakernas (Lokakarya EPS), Jakarta, 1979.
- Winati Wigna, dkk.: Comparison of the results of time-allocation research using two different recall periods. (Paper at Joint Agro-Economic Survey-IRRI Village Studies Workshop, IRRI, Los Banos, 1980).
- White R. : Measuring time allocation, decision-making and agrarian changes affecting rural women: examples from recent research in Indonesia (Working Paper Series No.17, ISS, The Hague, 1983).
- Morris, M.D. and M.B. McAlpin: Measuring the Condition of India's Poor: The Physical Quality of Life Index (New Delhi, Promilla and Co Publishers, 1982).

Grant, J.P.: Disparity Reduction Rates in Social Indicators: a proposal for measuring and targeting progress in meeting basic needs (Monograph No. 11, The Overseas Development Council. Washington DC, 1978).

Sajogyo, dkk.: Status dan Potensi Sumberdaya Manusia (Makalah pada Widyakarya Pangan dan Gizi), Jakarta, 26 - 30 Juli 1983).

Indikator Sosial (anjuran FAO) dan yang oleh BPS dicantumkan dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1980/81 (IKS-80/81) (Dr. Sajogyo, LPSP-IPB, 1982)

Bidang	Indikator Primer	Penggolongan	Indikator Tambahan (Contoh selektif saja)
1	2	3	4
A. Pertumbuhan			
1. Penduduk	1. Pertumbuhan penduduk (IKS-80/81)	(urban, rural) (sex)	Data fertilitas KB dll. (IKS-80/81)
2. Sumberdaya alam	2. Tanah pertanian a) total b) per kapita (total) c) per kapita (penduduk dalam pertanian)	(type wilayah)	1. Tanah pertanian dengan: a. irigasi (%); b. teras (%) 2. Jumlah ternak besar per tenaga kerja pertanian
3. Pertumbuhan ekonomi (umum)	3. GDP (total, per kapita)		Laju inflasi (index biaya hidup: IKS 80/81)
4. Pertumbuhan pertanian	4. GDP pertanian (total/kapita penduduk total, per kapita penduduk pertanian)		1. Investasi publik dalam pertanian 2. "Terms of trade" bagi petani 3. Produksi hasil pertanian pokok dan yield/hektar 4. Intensitas pertanaman
5. Kegiatan Pedesaan di luar pertanian	5. Konsumsi tenaga listrik per kapita	(urban, rural)	1. Kepadatan jalan-jalan (per/km ² lahan) 2. % rumah tangga dengan lampu listrik, memasak (IKS, 80/81)
B. Pemerataan			
1. Kemiskinan	6. Persentase pendapatan diterima oleh lapisan bawah 40% 7. Persentase penduduk dalam rumah tangga "miskin" (dibawah garis kemiskinan)	(urban, rural) (golongan sosial ekonomi) (urban, rural) (golongan sosial ekonomi)	1. Rata ² pendapatan per kapita tiap desil lapisan penduduk
2. Gizi	8. Persentase penduduk gizi kurang 9. Persentase anak di bawah lima tahun yang gizi kurang	(urban, rural) (golongan sosial ekonomi) (idem)	
3. Kesehatan	10. Reitmortalitas bayi 11. Reitmortalitas anak	(idem)	1. Jumlah petugas lapang kesehatan per 1000 penduduk (IKS-80/81) 2. Jumlah bidan/dukun beranak terlatih per 1000 wanita umur subur
4. Perumahan	12. Persentase rumah tangga dengan perumahan "cukup baik" (ukuran setempat)	(urban, rural) (golongan sosial ekonomi)	1. Persentase rumah tangga memiliki rumah tinggal sendiri. 2. Persentase rumah tangga dengan: - air bersih, (pipa) - fasilitas kakus (IKS-80/81) 3. Jumlah orang per kamar dalam perumahan.

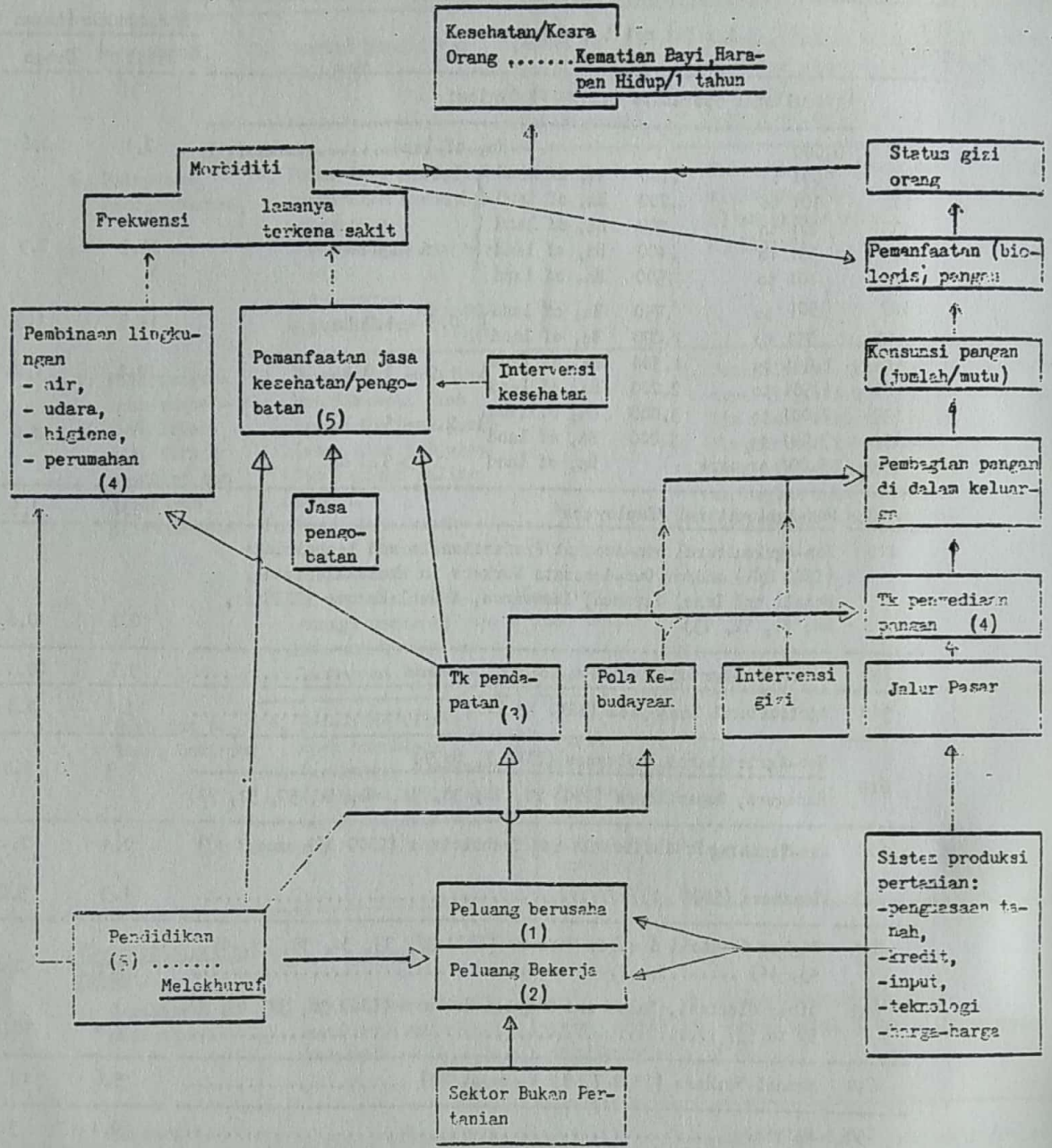
1	2	3	4
5. Pendidikan	13. Tingkat pendidikan (IKS-80/81)	(urban, rural) (sex) (umur) (golongan sosial ekonomi)	1. %-orang dewasa melek huruf (serta penduduk umur 15 tahun lebih menurut sex). 2. %-anak dalam SD, menurut sex.
6. Pelayanan kesejahteraan	14. Persentase penduduk memperoleh kemudahan pelayanan: - peneediaan air bersih - kesehatan - pendidikan) IKS 80/81		1. Persentase penduduk yang terjangkau a) jalan-jalan segala cuaca/musim b) kendaraan umum c) listrik
7. Pola penguasaan sumberdaya lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanannya	15. Persentase luas lahan dikuasai oleh lapisan petani gurem (atau oleh 50%, atau 25% lapisan paling sempit) 16. Persentase rumah-tangga petani tanpa milik tanah 17. Persentase rumah-tangga pedesaan yang diterima kredit ke-lembagaan formal	(menurut kelas luas tanah)	1. Penggolongan rumah-tangga pertanian menurut jenis penguasaan lahan (milik sewa, bagi hasil, dll.) 2. Fragmentasi lahan usahatani 3. Re-distribusi tanah (jumlah penerima bagian luas lahan) 4. Reit pengembalian kredit
8. Upah dan peluang bekerja	18. Rata-rata tingkat upah buruhtani 19. Persentase buruhtani (terhadap angkatan kerja dalam pertanian)	(sex) (sektor tradisional, modern) (jenis pekerjaan) (musiman)	
C. Peranserta masyarakat:			
1. Organisasi di pedesaan	20. Peranserta orang dewasa yang anggota Koperasi	(sex) (urban, rural) (jenis koperasi)	1. Jumlah kontak tani/desa 2. Jumlah wakil anggota dalam pengurus KUD.
2. Swadaya masyarakat	21. Peranserta penduduk dalam kegiatan swadaya kelompok/masyarakat (kampung/desa)	(sex) (bidang kegiatan swadaya)	1. Jumlah penduduk yang aktif/dalam kelompok informal-swadaya menurut bidang kegiatan, sex: sebagai kader, sebagai peserta.

Tabel 1. Modified Socio-Economic Household Classifications (R. DOWNEY)

Sub group	Definitions		% Penduduk (tahun 1976)				
			Rural	Urban	R + U		
Agricultural Operators (ISIC 1) Owning:							
100	0.000		Ha, of land	2.1	0.6	1.8
101	001 to	.100	Ha, of land	} < 0.5 ha	24.5	2.9	20.4
102	101 to	.200	Ha, of land				
103	201 to	.300	Ha, of land				
104	301 to	.400	Ha, of land				
105	401 to	.500	Ha, of land				
107	501 to	.750	Ha, of land	0.5 - 1.0 ha	14.5	1.5	12.0
110	751 to	1.000	Ha, of land	1.0 - 2.0 ha	10.8	1.2	9.0
115	1.001 to	1.500	Ha, of land	} 2.0 - 5.0 ha	5.1	0.6	4.8
120	1.501 to	2.000	Ha, of land				
130	2.001 to	3.000	Ha, of land				
150	3.001 to	5.000	Ha, of land	> 5.0 ha	0.7		
151	5.001 or more		Ha, of land				
310	Non-Agricultural "Employers"				3.2	7.5	4.0
410	Non-Agricultural Own-Account Professionals and technicians (ISCO 0/1) and/or Own-Accounts Workers in Wholesale Trade, Hotels and Inns, Finance, Insurance, & Real Estate (ISIC 61, 64, 81, 82, 83)				0.2	0.6	0.2
420	Other Non-Agricultural Own-Account Workers				9.7	20.1	11.7
510	Agricultural Employees (ISIC 1, ISCO 6)				13.4	2.1	11.3
610	Non-Agricultural Employees (ISIC 2, to 9) Managers, Supervisors (ISCO 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 70)				1.3	9.0	2.7
621	Non-Teaching Professionals and Technicians (ISCO 0/1 except 13)				0.4	2.4	0.7
622	Teachers (ISCO 13)				1.3	3.0	1.7
631	Higher Clerical & sales Workers (ISCO 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44)				0.6	7.4	1.2
632	Other Clerical, Sales and Service Workers (ISCO 36, 37, 45, 49, 52 to 59)				2.8	10.5	4.3
640	Manual Workers (ISCO 7, 8, 9 except 70)				5.6	19.3	8.2
650	Military				0.4	3.2	0.9
Economically inactive Households whose Heads are:							
701	Less than 25 Years Old			}	3.5	8.0	4.3
702	Between 25 and 45 Years Old						
703	More than 45 years Old						
900	Unclassified				100.0	100.0	100.0
Total					(103.71	(23.76-	(127.47-
					juta o-	juta o-	juta o-
					rang)	rang)	rang)

Source: Interim Report - Roger Downey.

BAGAN: Beragam Jalur Pemerataan Dalam Pembangunan Tertuju Pada Kebutuhan Dasar Manusia (Dari Grant 1978, di-adaptasi Sajogyo) dan tempat Indeks Mutu Hidup didalamnya.



- Catatan:** 1) Angka (kurang) menunjukkan unsur-unsur dalam 8 jalur pemerataan: (1) peluang berusaha; (2) peluang bekerja; (2) peluang bekerja; (3) pendapatan mencukupi; (4) tingkat pangan/papan/perumahan; (5) tingkat kesehatan dan pendidikan. Dua unsur lain (6) perantara masyarakat (a.l. pemuda dan wanita) dan (7) pemerataan antar daerah dan antar desa-kota, tercakup di seluruh jalur tersebut, begitu pula unsur (8) "keadilan hukum" (perilaku "rasa aman/martabat diri").
- 2) Indeks Mutu Hidup disusun dari 3 indikator: Angka Kematian Bayi, Harapan Hidup (1 tahun) dan Angka Melekhuruf (15 tahun +).



PROF. SAJOGYO

KUMPULAN TULISAN
BAGIAN II

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN SAINS
